

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai Golongan Karya adalah Partai yang mengalami banyak dinamika kepengurusan serta pengalaman organisasi yang cukup dikarenakan partai ini termasuk salah satu partai yang terbentuk lama dibanding partai-partai lain. Regenerasi kepengurusan terjadi untuk mempertahankan keberadaan Partai Golkar hingga sekarang ini, regenerasi itu terjadi karena kehadiran kaderisasi yang dilakukan oleh seluruh organisasi, termasuk Partai Golkar. Pembentukan kader yang kuat merupakan salah satu misi dari suatu organisasi dalam rangka penguatan keorganisasian partai politik.

Studi Akbar Tanjung dalam bukunya “The Golkar Way: Survival Partai Golkar di tengah Turbulensi Politik Era Transisi” (2008) menunjukkan Partai Golkar mengalami banyak turbulensi politik era transisi demokrasi, pada saat itu Partai Golkar membuat rumusan paradigma baru Partai Golkar yang diprakarsai oleh Akbar Tanjung yang menjadi ketua umum Partai Golkar pasca orde baru dan menghindari Partai Golkar dari kehancuran.

Akbar Tanjung adalah produk dari kaderisasi di Partai Golkar, menjadi salah satu contoh pentingnya kader yang mengalami proses kaderisasi yang baik sehingga mampu mengangkat organisasinya pada saat masa-masa organisasi yang kelam.

Di suatu organisasi, termasuk partai politik dibutuhkan orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk memimpin. Untuk itu diperlukan sistem kaderisasi yang baik sehingga keberlangsungan organisasi terjaga. Dalam organisasi partai politik, kaderisasi politik dimaksudkan untuk membentuk kader-kader partai yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi partai dan kepemimpinan publik.

Melalui kaderisasi, partai politik melahirkan politisi dan kader-kader partai tidak hanya untuk rekrutmen politik dalam Pemilu (kandidasi) tetapi juga untuk mengisi jabatan strategis dalam kepengurusan partai politik, nasional maupun lokal.

Kaderisasi merupakan suatu proses dalam membentuk dan menyiapkan calon pemimpin baru yang sanggup memikul tanggung jawab di suatu organisasi dalam mengarahkan dan mengatur orang-orang didalam kepengurusan agar dapat bekerja sama mewujudkan tujuan suatu organisasi. Yang tak kalah penting dari kaderisasi partai adalah yang melibatkan para pengurus dan para anggota dalam menjalankan organisasinya untuk keperluan mewujudkan cita-cita partai dan menyerap aspirasi masyarakat, dengan sistem kaderisasi partai yang baik maka akan meningkatkan kinerja partai dalam menarik perhatian masyarakat karena dianggap mampu untuk melakukan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi partai politik. Hal sebaliknya yang terjadi ketika suatu kaderisasi kepemimpinan oleh partai politik tidak berjalan baik akan sangat berbahaya bagi partai politik tersebut. Karena ketika kaderisasi kepemimpinan partai politik tidak berjalan dan gagal, maka akan menyebabkan visi, misi dan tujuan organisasi tidak sampai kepada generasi penerusnya, tidak mungkin bagi generasi yang sebelumnya

memikul sendirian karena pada suatu titik harus ada pergantian kepengurusan, partai akan kesulitan dalam melakukan pergantian pengurus dikarenakan tidak tersedia orang yang mampu melanjutkan kepengurusan karena tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan. Para anggota yang tidak dikader merasa tidak dipedulikan oleh partai kemungkinan akan meninggalkan partai tersebut, sehingga bisa menyebabkan partai tersebut kekurangan kader yang nantinya akan membuat program-program yang dirancang menjadi tidak berjalan, eksistensi dari partai tersebut kian lama akan lenyap dan pada akhirnya ketika sudah tidak ada yang tersisa di partai tersebut, besar kemungkinan akan bubar.

Para kader ini sangat penting karena mereka yang akan menjadi penentu dalam perhatian masyarakat melihat partai politik tersebut, kader-kader partai yang menarik perhatian masyarakat adalah kader yang memiliki kualitas, ketika sistem kaderisasi partai dapat menciptakan kader-kader yang berkualitas, maka kader tersebut dapat menarik suara dari masyarakat, semakin baik kualitas kader maka semakin besar kemungkinan untuk meraih suara dari masyarakat dan makin besar kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang menciptakan kader-kader tersebut, karena masyarakat menilai bahwa kader yang berkualitas akan sanggup mewakili aspirasi dan keinginan dari masyarakat. Jadi kualitas dari suatu partai politik dilihat dari kinerja dan kualitas kader partai dalam mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sejarah menunjukkan Partai Golkar merupakan partai tertua yang ada di Indonesia yang tetap bertahan di era reformasi. Embrio Partai Golkar adalah kelompok fungsional, digagas oleh Presiden Sukarno sebagai strategi

mengimbangi pertumbuhan PKI, namun baru terealisasi di masa kepemimpinan Presiden Suharto (Pamungkas, 2011: 126). Awal pembentukannya oleh golongan militer yang mengumpulkan 200-an organisasi fungsional untuk dihimpun menjadi satu kesatuan dengan nama Sekber GOLKAR (Sekretariat Golongan Karya), terbentuk pada tanggal 20 Oktober 1964, dan untuk pertama kali dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono, estafet pemimpin berikutnya selalu berasal dari militer sampai digantikan oleh Akbar Tanjung (1978), pemimpin sipil pertama. Perubahan ini berimbas, sejak itu mulai ada perpecahan yang diikuti lahirnya partai baru. Sempalan Golkar imbas dari pertarungan politik muncul partai baru PKP (kelak bertransformasi menjadi PKPI) dipimpin Edi Sudrajat, mantan panglima militer. Hal yang sama salah satu Kino Golkar, MKGR lepas dan berdiri sebagai partai baru (Pamungkas, 2011:124).

Organisasi-organisasi fungsional yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini lalu dikelompokkan berdasarkan “kekaryaannya” ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (Kino), yaitu: (1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro); (2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi); (3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR); (4) Karya Profesi; (5) Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam); (6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari); dan (7) Karya Pembangunan.

Sekber Golkar menjadi Golkar tanggal 17 Juli 1971, yang semula tidak berafiliasi politik, memutuskan untuk mengikuti pemilu 1971 dan berhasil menang dengan 62,79 % suara dan sebaran suara yang cukup merata di seluruh

provinsi. Golkar dengan demikian melakukan fungsi partai politik namun tidak menyebut dirinya sebagai partai politik (Pamungkas, 2011: 124-125).

Semasa Orde Baru Golkar menjadi partai penguasa dengan semua kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berimbas selalu menang pemilu. Kedekatan Golkar dengan rezim Soeharto kelak berimbas pada posisi Golkar yang juga digugat statusnya pada Era Reformasi, pada masa ini kepemimpinan Golkar diuji. Hasilnya, Akbar Tanjung mampu mempertahankannya. Dibawah kepemimpinan Akbar Tanjung Golkar resmi menjadi partai politik dan berhasil keluar dari krisis dengan mengusung citra sebagai “Golkar Baru”. Kepiawaian Akbar Tanjung sebagai kader Partai Golkar berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra.

Dewasa ini, nilai-nilai yang dianut oleh Partai Golkar seakan mulai lenyap. Nilai Karya-Kekaryaan yang dibawa oleh Partai Golkar sebagai suatu doktrin utama kader Partai Golkar yang menegaskan bahwa ideologi dan aliran politik harus dihapuskan atas dasar mengutamakan karya nyata untuk negara sudah tidak terlalu terasa di partai ini terkhususnya DPP Partai Golkar. Nilai ini luntur karena kondisi Partai Golkar ini cenderung menjadi pragmatis.

Pragmatisme yang menjangkiti Partai Golkar ini cukup memberi dampak bagi partai, pragmatisme yang dimaksud disini adalah menilai suatu hal dari unsur materialistik yang dianggap menguntungkan, sehingga pragmatisme menyebabkan ketidakadilan yang menguntungkan beberapa pihak kader Partai Golkar dan merugikan sebagian pihak lain dari kader Partai Golkar.

Pragmatisme membuat partai tidak melihat para kadernya secara objektif, sehingga kader yang tidak dipandang secara objektif akan merasa kecewa didalam organisasi yang dia ikuti dan pada akhirnya membuat kader tidak memberikan performa yang maksimal dalam menjalankan tugas partai.

Salah satu indikator yang bisa dipakai untuk melihat performa partai adalah seberapa besar partai tersebut mampu meraup suara masyarakat, karena kader-kader yang mempunyai kapabilitas akan mampu mendongkrak kemampuan partai dalam meraih kepercayaan masyarakat untuk mendukung suatu partai menjadi yang berkuasa dalam menjalankan suatu kebijakan, sehingga penulis mengambil contoh performa Partai Golkar meraih kepercayaan masyarakat dalam pemilihan legislatif sebagai salah satu gambaran bagaimana performa yang dilakukan oleh Partai Golkar semenjak awal Reformasi.

Tabel 1.1

Perolehan Suara Legislatif Partai Golkar Pemilu 1999-2019

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	Persentase	Hasil	Ketua
1999	120 / 500	23,741,749	22.46%	▼ 205 kursi	Akbar Tanjung
2004	129 / 550	24,480,757	21.58%	▲ 8 kursi	Akbar Tanjung
2009	106 / 560	15,037,757	14.45%	▼ 22 kursi	Jusuf Kalla
2014	91 / 560	18,432,312	14.75%	▼ 15 kursi	Aburizal Bakrie
2019	85 / 575	17,229,789	12.31%	▼ 6 kursi	Airlangga Hartanto

Seperti yang bisa kita lihat bahwa performa Partai Golkar dari waktu ke waktu cenderung turun semenjak Reformasi. Peneliti menganggap bahwa pragmatisme yang terjadi di Partai Golkar terkhususnya di kepemimpinan pusat (DPP Partai Golkar) telah mempengaruhi performa para kader dan juga kaderisasi yang dijalankan oleh DPP Partai Golkar, karena kaderisasi dan kader merupakan nyawa dari suatu organisasi itu sendiri.

Dalam perspektif kepentingan internal partai, kaderisasi tidak hanya memberikan jaminan bagi keberlangsungan hidup suatu partai politik, tetapi juga strategi untuk meraih kejayaan partai politik dalam kontestasi kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai hal yang telah yang telah dijabarkan, penulis hendak mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pragmatisme yang terjadi dalam kaderisasi di internal DPP Partai Golkar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Mengapa terjadi Pragmatisme dalam kaderisasi internal yang dijalankan oleh DPP Partai Golkar?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada hal-hal apa saja yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan dari sejumlah pengetahuan dan mengarah pada usaha untuk memahami dan

menerangkan dari tujuan penelitian tersebut. Tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Menjelaskan bagaimana situasi kaderisasi di internal DPP Partai Golkar.
2. Memahami dinamika internal kaderisasi DPP Partai Golkar.
3. Mengetahui mengapa terjadi pragmatisme didalam kaderisasi di internal DPP Partai Golkar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat sebagai sumber pengetahuan untuk menganalisis fenomena pragmatisme yang terjadi di DPP Partai Golkar.
2. Bagi peneliti sebagai sarana pembelajaran dan penambah pengetahuan.
3. Bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu baru dalam dunia pendidikan.
4. Bagi DPP Partai Golkar untuk refleksi diri mengenai fenomena yang terjadi.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan sudut pandang lain dari penelitian ini, karena dengan menelaah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilaksanakan oleh peneliti lain, menjadi faktor penguat bagi penulis untuk melakukan penelitian berbeda yang belum pernah diteliti sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadi suatu kontribusi baru karena adanya pembeda dibandingkan

penelitian sebelumnya. Penulis mencari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki sedikit relevansi dengan penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian ini bisa melengkapi kekurangan yang tidak diungkap dari penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian oleh Deby Triasa (2016), Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berjudul “Sistem Kaderisasi Partai Golkar: Studi Kasus di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik Partai Golkar di Era Reformasi bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi dalam rekrutmen calon anggota partai. Kaderisasi politik Partai Golkar sudah bagus, tetapi masih ada kendala masalah keuangan dan intruktur materi. Pelembagaan politik Partai Golkar belum sempurna karena masih adanya ketergantungan partai terhadap pihak-pihak yang berasal dari non partai, khususnya masalah dana. Fokus dari penelitian ini adalah sistem kaderisasi yang dimiliki oleh DPD Partai Golkar di Jawa Tengah, tidak membahas mengenai pragmatisme yang terjadi di kaderisasi.

Kedua, Skripsi oleh Danny Widodo Uji Prakoso (2018), Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berjudul “Analisis Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Pati 2017.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa partai-partai yang berada di Kabupaten Pati gagal untuk menyiapkan kadernya dikarenakan kontestasi pilkada yang dilaksanakan hanya menjadikan calon tunggal melawan kotak kosong yang dimanan calon tunggalnya sendiri

berasal dari petahana, dan calon tunggal yang diusung oleh banyak partai ini menyimpulkan bahwa partai nya tidak mampu menyiapkan kader yang bisa dicalonkan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, fokus penelitian ini juga berbeda yaitu pada fenomena calon tunggal petahana yang dilihat dari sisi kaderisasi partai-partai pengusungnya, Persamaanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

1.5.2 Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Namun, banyak juga dari para ahli yang memberi definisi partai politik dari sudut pandang yang berbeda-beda. Partai politik, menurut Ramlan Surbakti (1992:116), adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Disini maksud dari alternatif kebijakan, sebagai negara demokrasi maka semua kebijakan memerhatikan aspirasi masyarakat.

Sementara menurut Miriam Budiarjo (2008:404), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik punya tujuan untuk menduduki posisi politik

dan juga meraih kekuasaan melalui suara rakyat secara sah menurut konstitusi untuk melaksanakan kebijakan dan keinginan serta cita-cita dari partai politik. Jika dilihat dari penjelasan yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, partai politik memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama yang dimana seluruh anggotanya memiliki pemahaman yang sama terkait hal tersebut, dalam hal ini, partai politik harus melakukan persamaan persepsi bagi para anggotanya yang sudah maupun mereka yang sedang dalam masa transisi untuk menjadi bagian dari partai politik tersebut.

Sigmund Neuman dalam Miriam Budiardjo (2008: 403) mengemukakan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang pandangannya dianggap berbeda. Persaingan yang terjadi antar partai politik menjadi hal yang lumrah. Adu kemampuan tiap partai politik menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda tergantung dengan strategi yang tiap partai sudah siapkan dalam menarik minat masyarakat harus dimiliki oleh seluruh kader partai yang tergabung. Pentingnya kesamaan persepsi dalam meraih perhatian masyarakat sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat menilai mana partai politik yang “rapih”, akan menarik hati masyarakat sehingga nantinya akan besar kemungkinan dipilih oleh rakyat.

Ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo (2008: 403) mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Mengorganisir sekelompok orang memerlukan kaderisasi yang baik dan terstruktur untuk mengarahkan anggota-anggota dari partai politik agar bisa sama-sama saling memahami tujuan yang dicapai melalui nilai-nilai keorganisasian yang sudah ditetapkan dalam AD/ART partai yang menjadi dasar didirikannya partai tersebut.

Menurut Miriam Budiarjo (2008:405-409) terdapat 4 fungsi partai politik, yaitu :

1. Fungsi sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

2. Fungsi partisipasi politik

Partai politik dijadikan sebagai salah satu wadah untuk menampung hasrat atau keinginan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik seperti ikut serta dalam proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah

3. Fungsi rekrutmen politik

Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu

memperjuangkan nasib rakyat untuk mensejahterakan dan menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

4. Fungsi komunikasi politik

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah sebagai sarana untuk menyampaikan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat.

1.5.3 Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki fungsi rekrutmen politik, menurut Ramlan Surbakti (1992:189) fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaan yaitu dengan adanya regenerasi terus menerus kepengurusan partai politik tersebut sehingga harus selalu dilakukan rekrutmen dalam mencari orang-orang untuk regenerasi yang juga memiliki kapabilitas dalam menjalankan partai politik serta membawa lebih partai politik ke arah yang lebih baik lagi.

Ramlan Surbakti (1992:188) juga mengatakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen Politik merupakan suatu keutamaan yang harus dijalankan oleh partai politik demi meneruskan kepemimpinan dan kepengurusan partai dalam mempertahankan kinerja partai agar tetap selalu menghasilkan output yang terbaik. Jika partai

politik tersebut adalah partai yang menjadi mayoritas pemenang didalam lembaga legislatif maka partai politik tersebut punya kesempatan untuk berwenang dalam membentuk pemerintahan di sistem politik demokrasi karena memiliki suara yang besar dalam menentukan keputusan, rekrutmen politik tersebut sangat penting dilakukan oleh parpol, karena fungsi rekrutmen itu sendiri juga suatu kelanjutan dari fungsi untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan partai politik tersebut di lembaga perwakilan rakyat.

Menurut Fadillah Putra, (2003:209), terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain.

1. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- a. Mekanismenya demokratis
- b. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
- c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi

- d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.
2. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum

Dengan demikian, proses rekrutmen politik memiliki tujuan yakni, rekrutmen politik diharapkan agar dapat mencari orang yang punya kemampuan dan probabilitas untuk menjadi bagian dari partai politik dengan harapan dapat menjadi individu yang mampu membawa partai lebih baik dari yang ada

sebelumnya sehingga kepengurusan partai tetap terjadi regenerasi yang nantinya akan membuat partai sanggup mempertahankan kekuasaannya dari waktu ke waktu.

Dalam Bhakti & Nurhasim (2016: 67) disebutkan bahwa, demokrasi dalam pemilihan pengurus partai ini, dapat dilakukan dengan skema sebagai berikut:

Tabel
Indikator Proses Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Pengurus Parpol

Indikator	Proses Penjaringan	Proses Penyaringan	Proses Penetapan
Calon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader partai yang diusulkan oleh pengurus partai dan/atau anggota partai, sesuai dengan tingkatannya 2. Pengurus tingkat Kecamatan oleh anggota 3. Pengurus tingkat kabupaten oleh pengurus tingkat kecamatan 4. Pengurus tingkat provinsi oleh pengurus tingkat kabupaten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi administratif dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk melalui rapat pengurus harian di masing-masing tingkat, yang terdiri dari Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dilakukan berjenjang, sesuai dengan tingkatannya. 2. Ditetapkan oleh Ketua setingkat di atasnya. 3. Prinsip yang dianut, elit politik yang memiliki kewenangan menetapkan tidak dapat menganulir proses demokrasi

	<p>5. Pengurus tingkat nasional oleh pengurus tingkat provinsi</p>	<p>kesekretariatan.</p> <p>2. Seleksi personal melalui wawancara dilakukan setelah verifikasi data-data dan persyaratan terpenuhi.</p> <p>3. Penandatanganan kontrak komitmen terhadap partai politik.</p>	<p>internal yang sudah berjalan, kecuali ada sengketa atau temuan penyimpangan</p>
<p>Pemilihan</p>	<p>1. Pengurus Tingkat Kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih: pengurus tingkat paling bawah (desa) 2. Anggota mencalonkan pengurus di tingkat kecamatan. 3. Prinsipnya one delegate, one vote. <p>2. Pengurus Tingkat Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih adalah utusan atau delegasi dari pengurus tingkat kecamatan 2. Pengurus Tingkat Kabupaten periode sebelumnya sebagai utusan partai 3. Prinsipnya one delegate, one vote. 		

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengurus Tingkat Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih adalah utusan atau delegasi dari pengurus tingkat kabupaten 2. Pengurus Tingkat Provinsi periode sebelumnya sebagai utusan partai 3. Delegasi Pengurus Nasional (maksimal 5 suara) yang akan menggunakan suaranya 4. Prinsipnya one delegate, one vote. 4. Pengurus Tingkat Nasional <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih adalah utusan atau delegasi dari pengurus tingkat kabupaten dan provinsi 2. Pengurus Nasional periode sebelumnya 3. Prinsipnya one delegate, one vote.
<p>Kriteria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif dalam jajaran partai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus. 2. Memiliki sertifikasi pelatihan kader partai sesuai dengan jenjang pimpinan partai politik 3. Tidak memiliki catatan perilaku kriminal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian 4. Tidak pernah terlibat dalam praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta narkoba 5. Memiliki kompetensi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan moralitas yang baik selama aktif di partai politik yang dibuktikan oleh rekam jejak secara administratif oleh partai politik

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tidak sedang menjadi anggota partai politik lain 7. Menyatakan kesediaan untuk memberikan kontribusi kepada partai baik dalam bentuk keuangan waktu, pemikiran, tenaga dan sanggup secara kolektif bekerjasama dalam partai politik.
Kompetisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi bersifat terbuka dan fairness, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota/kader partai 2. Setiap anggota/kader partai yang memenuhi ketentuan administrasi dan kriteria berhak maju sebagai calon. 3. Proses pemilihan menganut cara satu delegasi, satu suara (<i>one delegate, one vote</i>). 4. Calon yang melakukan penyimpangan pemilihan (<i>electoral fraud</i>) didiskualifikasi. 5. Penyimpangan yang dimaksud berkaitan dengan penggunaan uang, penggunaan pengaruh, tekanan, kekerasan dan intimidasi serta black-campaign.
Komposisi pengurus	<ol style="list-style-type: none"> 1. 90% quota kader 2. 30% memenuhi quota perempuan 3. Maksimal 10 % dari unsur luar partai—seseorang yang potensial membantu partai, tetapi belum menjadi anggota partai.

Sumber: Bhakti & Nurhasim, 2016: 67-68

1.5.4 Kaderisasi

Kader menurut KBBI adalah perwira atau bintanga dalam ketentaraan: orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai dan sebagainya. Sedangkan pengkaderan adalah proses, cara, perbuatan mendidik, atau membentuk seseorang menjadi kader (Daryanto, 1998: 289).

Menurut Triwidaryanta (2008:13), kaderisasi adalah proses mencari bibit-bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah berkaitan dengan senang hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Kaderisasi bisa dibilang sebagai suatu ajang pendidikan kader untuk mengetahui dan mengembangkan potensi individu para kader dengan cara menanamkan ide serta mentransfer pengetahuan, agar dapat memunculkan kader-kader yang siap dan tangguh dalam menghadapi dinamika politik, juga memenuhi kebutuhan regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan untuk mempertahankan eksistensi organisasi.

Teori yang dikutip Kartono (1994: 51) mengatakan kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Pelaksanaan kaderisasi melibatkan banyak sistem yang saling berkaitan, peranan kaderisasi sangat diperlukan guna menciptakan kader-kader yang unggul dan berkualitas untuk meningkatkan elektabilitas partai serta menarik suara dan minat dari masyarakat, kaderisasi memiliki peran yang sangat penting.

Kaderisasi adalah proses mencari bibit-bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah berkaitan dengan senang

hati akan terlibat mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi (Triwidaryanta, 2008:13)

Kaderisasi organisasi dapat dipetakan dalam dua point, point pertama mengenai para pelaku kaderisasi itu, point selanjutnya adalah sasaran dari pelaksanaan kaderisasi. Pelaku kaderisasi adalah sebuah individu atau suatu kelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sasaran kaderisasi adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi (Triwidaryanta, 2008:14).

Kaderisasi lebih bersifat sebagai suatu internalisasi parpol dalam melakukan peningkatan kapabilitas para kader untuk menjalankan tugas tugas partai sebagai fungsionaris, sehingga para kader mampu menjalankan amanat yang ditugaskan oleh partai baik dalam menjadi pengurus maupun menjadi pejabat publik di tingkat pusat maupun tingkatan daerah. Kaderisasi partai politik pun menjadi sarana memproduksi kepengurusan dan kepemimpinan periode lanjutan dari organisasi tersebut. Oleh karena kaderisasi harus dilakukan secara profesional. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai (Bhakti & Nurhasim, 2016: 50).

Untuk memudahkan mengetahui adanya kaderisasi atau tidak dalam sebuah partai, ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai indikator. Pertama, adanya kurikulum atau silabus kaderisasi. Kedua, adanya divisi yang menjadi

penanggung jawab atau penyelenggara kaderisasi. Ketiga, ada rentang waktu yang jelas untuk masing-masing level penjenjangan kaderisasi. Keempat, output dari rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang disasar dari masing-masing level kaderisasi. (Bhakti & Nurhasim, 2016: 50-51)

Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut (Bhakti & Nurhasim, 2016: 52):

1. *Terbuka*, prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (training) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Prinsip terbuka ini sangat penting untuk para anggota partai politik karena hak bagi seluruh kader partai yang tergabung untuk mendapatkan pengajaran dan nilai yang sama sebagai satu kesatuan keluarga partai politik. Akan jadi hal yang berbeda jika kaderisasi tidak memiliki prinsip yang terbuka karena partai hanya akan mengalami konflik internal yang akan merusak partai itu dengan sendirinya karena ada kemungkinan pilih kasih atau anak emas yang nantinya membuat kecemburuan antar satu kader dan yang lainnya.
2. *Non-Diskriminatif*. Pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip ini juga penting

sama seperti yang dijelaskan pada point sebelumnya karena semua memiliki kesempatan yang sama besar tanpa melihat suku, agama, dan ras. Jika kaderisasi yang dilakukan bersifat diskriminatif, maka orang-orang akan memandang sebelah partai tersebut.

3. *Berjenjang*. Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Perjenjangan ini bermanfaat dalam mempertajam para kader mengenai nilai-nilai dan visi yang dibawa oleh partai agar menjadi kader yang terbaik yang bisa menempatkan posisi jabatan di partai ataupun dipemerintah sesuai dengan jenjang yang sudah dilalui, tentu semakin tinggi jenjang maka semakin tinggi posisi yang mungkin bisa di raih oleh kader tersebut.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Kaderisasi partai politik : proses mencari bibit-bibit unggul dari anggota partai politik melalui kegiatan sistematis, berkelanjutan dan terarah. Kaderisasi partai politik Partai Golkar akan dilihat dari dimensi kadersasi sebagai berikut:

1. Terlembaganya program kaderisasi:
 - a. Kurikulum atau silabus kaderisasi.
 - b. Divisi yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara kaderisasi.
 - c. Rentang waktu yang jelas untuk masing-masing level penjenjangan kaderisasi.

- d. Output dari rentang kaderisasi berupa capaian kapasitas yang disasar dari masing-masing level kaderisasi
2. Terpenuhinya prinsip-prinsip kaderisasi :
- a. Terbuka
 - b. Non-diskriminatif
 - c. Berjenjang/jenjang kader

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian mengenai pragmatisme kaderisasi di internal DPP Partai Golkar, Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Lincoln dan Guba (1985:52) mengemukakan bahwa dalam pendekatan kualitatif peneliti memanfaatkan diri sebagai instrumen, karena instrumen nonmanusia sulit digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi yang terjadi. Peneliti harus mampu mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya.

Peneliti harus dapat diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkap data yang tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan informan. Tipe penelitian ini berusaha memberikan penggambaran dan mendeskripsikan suatu sifat-sifat, fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang diteliti secara sistematis, akurat, dan faktual. Dalam hal ini penggambaran

yang dimaksud terkait tentang pragmatisme yang ada di kaderisasi internal DPP Partai Golkar

Deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Efek yang terjadi adalah kecenderungan yang sedang berkembang yang berkenaan dengan masalah ini, meskipun tidak jarang juga mempertimbangkan peristiwa masa lampau dengan pengaruh terhadap masa kini. Menurut Moelong (2002:89) penelitian deskriptif tepat digunakan dalam ilmu perilaku karena berbagai bentuk tingkah laku yang menjadi pusat perhatian penelitian dapat sengaja diatur dalam latar realitas, yaitu berkenaan dengan berbagai variabel, menguji hipotesis dan mengembangkan generalisasi yang memiliki validitas universal.

1.7.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Jakarta, penelitian akan dilakukan di beberapa tempat, yaitu di Kantor DPP Partai Golkar untuk mencari data-data dokumentasi, lalu penelitian juga dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Golkar, karena informan yang dibutuhkan oleh penulis kebanyakan berkantor di tempat itu.

1.7.3 Teknik Penetapan Informan

Untuk teknik penetapan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2010:183), teknik *purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, ataupun acak tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Tehnik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan

keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. Pada penelitian ini teknik purposive sampling digunakan oleh peneliti untuk menentukan informan.

Selain itu peneliti juga akan menggunakan teknik *snowball sampling*. Pendapat Nurdiani (2014:1113) mengatakan bahwa teknik *snowball sampling* adalah metoda sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metoda ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu.

Pada penelitian teknik *snowball sampling* digunakan dimaksudkan apabila terdapat informan lain yang dibutuhkan untuk melengkapi data diluar informan yang telah ditetapkan. Contohnya untuk mencari informan kader-kader akar rumput yang memiliki pemahaman lebih mengenai kaderisasi yang terjadi di Partai Golkar.

Peneliti mendapatkan 5 informan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Ratu Dian Hatifah S.Ag., M.Pd selaku Wakil Ketua 2 Lembaga Pengelola Kaderisasi DPP Partai Golkar Tahun 2009-2014
2. Veno Tetelepta, selaku Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Kepartaian DPP Partai Golkar tahun 2017-2019
3. Zulfikar Arse Sadikin selaku Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Kepartaian DPP Partai Golkar tahun 2019-2024
4. Darul Siska selaku Ketua Lembaga Pengelola Kaderisasi Partai Golkar tahun 2009-2014

5. Ichsan Firdaus selaku aktivis Organisasi Pendiri dan Didirikan Partai Golkar
6. Muhammad Sarmuji, selaku Anggota Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Kepartaian DPP Partai Golkar tahun 2017-2019
7. Nurul Arifin, selaku Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar 2019-2024

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam upaya memperoleh data primer yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pertanyaan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi lebih mendalam yang tidak bisa didapat dari data atau hasil pengamatan saja.

Data sekunder menggunakan teknik dokumentasi, yakni melalui penelusuran dokumen yang relevan. Penelusuran dokumen ini untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan objek penelitian. Dokumen dapat berupa surat-surat, catatan harian, risalah rapat, laporan, foto, dan video. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka, dilaksanakan dengan mencari buku-buku, jurnal, makalah, artikel maupun sumber bacaan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan data yang

legal dan akurat mengenai perihal yang dibutuhkan dalam menerangkan hasil penelitian. Studi pustaka juga dapat digunakan sebagai data tambahan secara teoritis.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010:244) mengungkapkan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori-kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, mensintesa data, menyusun data ke dalam pola-pola, memilah mana data yang penting, dan membuat kesimpulan agar data dapat dipahami dengan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Berikut langkah-langkah teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1.7.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis ketika penelitian di lapangan. Reduksi berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas data, menelusur tema, membuat kelompokan data. Teknik analisis ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang

yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

1.7.5.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:249), dengan melakukan penyajian data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian atau *display* data merupakan kegiatan penyusunan dari kumpulan informasi yang diperoleh, sehingga memunculkan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan penyajian data yaitu untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan yang ada. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

1.7.5.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2010:253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara *continue* selama berada di lapangan. Mulai dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka tetapi kesimpulan sudah disediakan.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atas suatu temuan dalam kumpulan data yang lain.